



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 1 (2025) pp: 423-427

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pendidikan Politik di Era Digital: Media Sosial sebagai Katalis atau Distorisi?

Feni Laventia¹, Ahmad Faizal², Slamet³

^{1,3}Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi, Indonesia

²Universitas Islam Cordoba (UNIC) Banyuwangi, Indonesia

laventiaf@gmail.com, faizal@uicordoba.ac.id, slamet.spsi17@gmail.com

Abstrak

Di era digital, media sosial telah menjadi alat utama dalam penyebaran informasi politik. Perannya yang luas memungkinkan peningkatan kesadaran politik masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi disinformasi yang dapat mengaburkan fakta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak media sosial dalam edukasi politik, mengidentifikasi manfaat serta tantangan yang ditimbulkan, dan mengeksplorasi strategi literasi digital yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan perannya sebagai alat edukasi politik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi media sosial, serta wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan akademisi di Banyuwangi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam penggunaan media sosial dalam politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai alat edukasi politik, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Namun, tantangan seperti penyebaran hoaks, bias algoritma, dan fenomena echo chamber menghambat pemahaman politik yang objektif. Oleh karena itu, literasi digital menjadi faktor kunci dalam meminimalkan dampak negatif media sosial dan memaksimalkan manfaatnya bagi demokrasi.

Kata Kunci: Media Sosial, Pendidikan Politik, Literasi Digital, Disinformasi

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami kemajuan pesat seiring dengan era globalisasi. Hal ini memungkinkan interaksi serta penyampaian informasi terjadi dengan lebih cepat dan efisien. Dampak globalisasi sendiri dapat bersifat positif maupun negatif bagi suatu negara [1] Dalam konteks era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Platform seperti Instagram, Twitter/X, TikTok, dan YouTube tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi sumber utama bagi masyarakat dalam mengakses informasi politik. Menurut MJ, Mustanir, dan Jabbar, media sosial memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi terkait visi dan misi politik agar dapat dijangkau oleh khalayak luas[2]

Politik mencakup serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam suatu kelompok serta hubungan kekuasaan antarindividu, termasuk dalam distribusi sumber daya dan status sosial[3] Dalam hal ini, budaya politik memainkan peran penting dalam menentukan kualitas demokrasi di tengah masyarakat. Kehadiran budaya politik yang baik dapat meningkatkan demokrasi serta mendorong partisipasi politik yang bermartabat [4] Sejalan dengan itu, pendidikan politik menjadi elemen fundamental dalam sistem pendidikan secara keseluruhan dan dapat diterapkan melalui berbagai metode [5] Pendidikan politik memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang aktif dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas demokrasi. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami sistem politik yang berlaku, meningkatkan kesadaran politik, serta mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam kehidupan demokrasi[6], [7]

Seiring dengan perkembangan zaman, pendekatan dalam pendidikan politik turut mengalami perubahan. Jika dahulu pendidikan politik lebih banyak bergantung pada institusi formal seperti sekolah, universitas, dan

organisasi masyarakat, kini model pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan mudah diakses. Perubahan ini didorong oleh kemajuan teknologi serta pergeseran pola konsumsi informasi di masyarakat, yang memungkinkan pendidikan politik tersampaikan melalui berbagai media digital dan platform daring. Menurut Berutu dkk, media digital merupakan bentuk modernisasi atau pembaruan dalam pemanfaatan teknologi, yang sering kali dikaitkan dengan keberadaan internet dan perkembangan teknologi informasi [8]

Media sosial memiliki potensi besar sebagai katalis dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Melalui berbagai konten edukatif, diskusi daring, dan kampanye digital, media sosial dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang politik, demokrasi, dan hak-hak warga negara. Menurut McNair media digital dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan partisipasi politik karena sifatnya yang demokratis dan mampu menjangkau khalayak luas dalam waktu singkat[9]. Namun, di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi distorsi dalam edukasi politik. Penyebaran informasi yang cepat tanpa adanya kontrol kualitas membuat platform ini rentan terhadap hoaks, propaganda, dan bias algoritma yang memperkuat polarisasi politik. Algoritma media sosial sering kali menciptakan "*filter bubble*", di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan mereka sendiri dan menghambat pemahaman yang objektif terhadap isu politik[10].

Di Indonesia, fenomena ini semakin terlihat dalam berbagai peristiwa politik, seperti Pemilu 2019 dan 2024, berbagai gerakan sosial yang banyak digerakkan melalui media sosial. Menurut data dari Kemp lebih dari 68% penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial, dan sebagian besar dari mereka mengakses informasi politik melalui platform digital[11]. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam politik. Salah satu tantangan utama di era digital adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Banyak pengguna media sosial belum memiliki keterampilan yang memadai untuk membedakan antara informasi yang valid dan berita hoaks, sehingga rentan terpengaruh oleh misinformasi.

Wardle & Derakhshan dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa disinformasi politik yang tersebar di media sosial dapat membentuk persepsi publik terhadap suatu isu politik, bahkan berpotensi memengaruhi hasil pemilu serta kebijakan publik[12]. Dalam konteks pendidikan, Sitompul dalam penelitiannya menekankan bahwa untuk memastikan keberhasilan proses pembelajaran di era digital, pendidik harus memiliki kompetensi digital yang memadai. Kemampuan ini menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan pendidikan modern yang semakin bergantung pada teknologi dan media digital [13]. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Adnyani & Rusadi menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Instagram, memiliki potensi besar dalam mendukung dan memperluas gerakan kesetaraan gender di Indonesia. Platform ini memungkinkan pemuda, kelompok advokasi, serta individu lainnya untuk menyuarakan isu-isu gender, memobilisasi dukungan, dan menyebarkan pesan-pesan yang mendukung gerakan tersebut[14].

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah media sosial lebih berperan sebagai katalis dalam meningkatkan pemahaman politik atau justru menjadi distorsi yang memperkeruh informasi politik. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana strategi literasi digital dapat membantu memaksimalkan manfaat media sosial sebagai alat edukasi politik serta mengurangi dampak negatifnya. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah, akademisi, serta masyarakat dalam merancang strategi edukasi politik yang lebih efektif di era digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi generasi muda agar lebih kritis dalam mengonsumsi informasi politik dan lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis peran media sosial dalam pendidikan politik, baik sebagai katalis pemahaman maupun sebagai distorsi informasi. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat[15]. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi media sosial, serta wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan pakar di Banyuwangi yang memiliki pemahaman tentang dampak media sosial terhadap politik. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh perspektif langsung dari akademisi, aktivis politik, serta pengguna media sosial yang aktif membahas isu politik. Sejalan dengan pendapat Bogdan & Biklen, wawancara mendalam dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai bagaimana individu memaknai dan merespons fenomena tertentu[16]. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yang memungkinkan identifikasi pola dan tren terkait pengaruh media sosial dalam membentuk pemahaman politik masyarakat. Miles, Huberman & Saldana menekankan bahwa analisis tematik efektif dalam mengorganisir data kualitatif menjadi temuan yang bermakna dan sistematis[17].

3. Hasil dan Diskusi

Di era digital, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah politik. Perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan informasi tersebar dengan cepat dan luas, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap isu-isu politik terkini. Media sosial berperan dalam membentuk opini publik, meningkatkan kesadaran politik, serta mendorong partisipasi politik dalam berbagai bentuk, mulai dari diskusi daring hingga gerakan sosial berbasis digital. Namun, seiring dengan manfaatnya, media sosial juga membawa tantangan besar, terutama terkait penyebaran disinformasi dan bias algoritma yang dapat memengaruhi pemahaman politik masyarakat. Pertanyaannya, apakah media sosial lebih berperan sebagai katalis yang meningkatkan pemahaman politik, atau justru menjadi distorsi yang mengaburkan fakta dan memperburuk polarisasi masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dipahami bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai alat edukasi politik sekaligus sebagai instrumen manipulasi informasi.

3.1 Media Sosial sebagai Katalis Pemahaman Politik

Media sosial menawarkan akses cepat dan luas terhadap informasi politik. Platform seperti Facebook, Twitter/X, Instagram, dan TikTok memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan berita terkini, berinteraksi langsung dengan tokoh politik, serta terlibat dalam diskusi seputar isu-isu politik yang berkembang. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana individu dapat mengakses informasi dari berbagai sumber tanpa harus bergantung pada media konvensional.

McNair menyatakan bahwa media sosial memiliki potensi besar dalam meningkatkan keterlibatan politik masyarakat. Dengan adanya media sosial, informasi politik menjadi lebih mudah dijangkau, dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi yang sebelumnya hanya bisa diakses oleh segelintir orang[9]. Hal ini juga didukung oleh Sunstein, yang menyoroti bahwa keterbukaan informasi yang difasilitasi oleh media sosial dapat memperkuat sistem demokrasi dengan meningkatkan keterlibatan warga negara dalam proses politik[10].

Selain itu, penelitian dari Kemp menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial terus meningkat secara global, dengan mayoritas pengguna berusia muda. Hal ini menandakan bahwa media sosial menjadi alat utama bagi generasi muda dalam memahami isu-isu politik[11]. Generasi ini lebih cenderung mencari informasi melalui platform digital dibandingkan media tradisional seperti televisi atau surat kabar. Akibatnya, mereka lebih mudah mengakses beragam perspektif dan mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang politik.

Bukti lain dari peran media sosial sebagai katalis politik dapat dilihat dalam berbagai gerakan sosial yang dimulai dari platform digital. Contohnya, gerakan #ReformasiDikorupsi di Indonesia pada 2019 yang berawal dari Twitter dan Instagram berhasil memobilisasi ribuan demonstran untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial mampu mempercepat penyebaran informasi, membangun kesadaran kolektif, dan meningkatkan partisipasi politik di kalangan masyarakat.

3.2 Media Sosial sebagai Distorsi Informasi

Di sisi lain, media sosial juga memiliki sisi gelap yang dapat menghambat pemahaman politik yang sehat. Penyebaran hoaks, bias informasi, dan propaganda politik sering kali menjadi masalah utama dalam dunia digital. Wardle dan Derakhshan menyoroti bahwa disinformasi yang tersebar di media sosial dapat membentuk persepsi publik yang keliru terhadap isu politik, bahkan berpotensi memengaruhi hasil pemilu dan kebijakan publik[12].

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penyebaran disinformasi adalah algoritma media sosial. Platform seperti Facebook dan YouTube menggunakan algoritma yang menampilkan konten berdasarkan preferensi dan riwayat pencarian pengguna. Hal ini menciptakan fenomena echo chamber dan filter bubble, di mana individu hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri tanpa mendapatkan perspektif lain[18]. Akibatnya, masyarakat cenderung mengabaikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka, yang pada akhirnya memperkuat polarisasi politik.

Selain itu, politisi dan kelompok kepentingan sering memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan narasi yang menguntungkan mereka, sering kali dengan cara yang manipulatif. Berita palsu dan propaganda sering kali dikemas dengan cara yang menarik dan emosional, sehingga lebih mudah viral dibandingkan dengan berita berbasis fakta. Dalam banyak kasus, misinformasi yang tersebar melalui media sosial telah menyebabkan ketidakstabilan politik, penurunan kepercayaan terhadap institusi demokrasi, dan bahkan konflik sosial.

Contoh nyata dari dampak negatif media sosial terhadap politik dapat dilihat dalam pemilu Amerika Serikat 2016, di mana disinformasi yang tersebar melalui Facebook dan Twitter diyakini telah memengaruhi opini publik

terhadap kandidat presiden[19]. Di Indonesia, fenomena serupa terjadi dalam Pilpres 2019, di mana hoaks politik tersebar luas melalui WhatsApp dan Facebook, menyebabkan polarisasi yang tajam antara pendukung kedua kubu.

3.3 Strategi Literasi Digital untuk Memaksimalkan Manfaat Media Sosial

Untuk memastikan bahwa media sosial lebih banyak berperan sebagai katalis pemahaman politik daripada menjadi sumber distorsi informasi, diperlukan strategi literasi digital yang efektif. Literasi digital merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki masyarakat agar dapat memilah informasi yang valid dan menghindari jebakan disinformasi. Menurut Sitompul, keberhasilan pembelajaran di era digital sangat bergantung pada kompetensi digital pendidik. Oleh karena itu, pendidikan literasi digital harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga [13]. Masyarakat perlu diajarkan bagaimana cara mengevaluasi sumber berita, mengenali tanda-tanda hoaks, serta memahami bagaimana algoritma media sosial bekerja.

Selain pendidikan formal, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga dapat berperan dalam meningkatkan literasi digital. Kampanye anti-hoaks yang dilakukan oleh berbagai lembaga seperti Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) telah membantu masyarakat lebih kritis dalam menyaring informasi. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang bersifat misinformasi serta meningkatkan transparansi dalam algoritma yang digunakan. Di tingkat individu, setiap pengguna media sosial juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menerima berita, mencari sumber informasi yang kredibel, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

Secara keseluruhan, media sosial memiliki potensi besar untuk menjadi katalis dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Dengan keterbukaan informasi dan akses yang luas, media sosial memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam diskusi politik dan memahami dinamika pemerintahan dengan lebih baik. Namun, tanpa literasi digital yang memadai, risiko penyebaran disinformasi tetap menjadi ancaman serius. Untuk memaksimalkan manfaat media sosial sebagai alat edukasi politik, diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, institusi pendidikan, media, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya verifikasi informasi. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi alat yang memperkuat demokrasi, bukan justru melemahkannya melalui distorsi informasi dan polarisasi politik yang semakin tajam.

4. Kesimpulan

Media sosial memiliki peran ganda dalam dunia politik: sebagai katalis yang meningkatkan pemahaman politik masyarakat sekaligus sebagai sumber distorsi informasi. Di satu sisi, media sosial mempercepat akses informasi, mendorong partisipasi politik, dan membuka ruang diskusi yang lebih luas. Namun, di sisi lain, penyebaran disinformasi, bias algoritma, dan fenomena *echo chamber* dapat menghambat pemikiran kritis serta memperburuk polarisasi politik. Untuk memastikan media sosial lebih berfungsi sebagai alat edukasi politik yang positif, diperlukan literasi digital yang kuat. Pendidikan sejak dini, kampanye anti-hoaks, serta peran aktif individu dalam menyaring informasi menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan ini. Dengan pendekatan yang tepat, media sosial dapat dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan kesadaran politik, dan membentuk masyarakat yang lebih kritis serta berdaya.

Referensi

- [1] V. L. Ngongo, T. Hidayat, and W. Wiyanto, "Pendidikan di era digital," in *In Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, Palembang: Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, 2019, pp. 628–638.
- [2] Muh. Z. MJ, A. Mustanir, and A. Jabbar, "Media Sosial Dalam Transformasi Politik (Studi Kasus Pemilihan Legislatif Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024)," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, vol. 11, no. 1, pp. 379–388, 2024.
- [3] A. Ghofur, M. Shabir, and Rokhmadi, "Politics of Law of The Protection of Plant Variety (PVT) And Its Implications for Food Security in Indonesia: A Maqashid Al-Shari'ah Perspective," *International Journal of Scientific and Technology Research*, vol. 9, no. 2, pp. 4805–48–14, 2020.
- [4] A. Arpandi, "Media Online dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum (Pemilu)," *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, vol. 3, no. 1, pp. 843–855, Aug. 2023, doi: 10.56832/edu.v3i1.293.
- [5] E. Farida and D. Wijaningsih, "Politics and legal philosophy of indonesian migrant worker protection: Case study in Malaysia," *International Journal of Scientific and Technology Research*, vol. 8, no. 11, pp. 2002–2004, 2019.

- [6] K. Bashori, "Pendidikan Politik di Era Disrupsi," *Sukma: Jurnal Pendidikan*, vol. 2, no. 2, pp. 287–310, Dec. 2018, doi: 10.32533/02207.2018.
- [7] M. A. Asavei, "Art, Politics and Religion in (Post-)Communist Romania: An Introduction," 2020, pp. 1–34. doi: 10.1007/978-3-030-56255-7_1.
- [8] T. A. Berutu, D. L. R. Sigalingging, G. K. V. Simanjuntak, and F. Siburian, "Pengaruh Teknologi Digital terhadap Perkembangan Bisnis Modern," *Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, vol. 2, no. 3, pp. 358–370, Jul. 2024, doi: 10.61132/neptunus.v2i3.258.
- [9] B. McNair, *An introduction to political communication (6th ed.)*. Routledge Taylor & Francis Group, 2018.
- [10] C. R. Sunstein and J. J. Myers, *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press, 2017.
- [11] S. Kemp, "Digital 2023: Global overview report," *We Are Social & Hootsuite*, 2023.
- [12] C. Wardle and H. Derakhshan, "Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking," *Strasbourg: Council of Europe*, vol. 27, pp. 1–107, 2017.
- [13] B. Sitompul, "Kompetensi Guru dalam Pembelajaran di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 6, no. 3, pp. 13953–13960, Jul. 2022, doi: 10.31004/jptam.v6i3.4823.
- [14] N. W. G. Adnyani and U. Rusadi, "Media Sosial sebagai Katalis Pendidikan: Dinamika Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia melalui Perspektif Strukturasi," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, vol. 8, no. 1, p. 70, Aug. 2023, doi: 10.30998/sap.v8i1.17797.
- [15] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, 2021.
- [16] R. C. Bogdan and S. K. Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. Pearson Education, 2018.
- [17] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, "Book Review: Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook," *German Journal of Human Resource Management: Zeitschrift für Personalforschung*, vol. 28, no. 4, pp. 485–487, Nov. 2014, doi: 10.1177/239700221402800402.
- [18] E. Pariser, *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York: The Penguin Press, 2011.
- [19] Y. Benkler, R. Faris, and H. Roberts, *Network Propaganda*. Oxford University Press New York, 2018. doi: 10.1093/oso/9780190923624.001.0001.